

Literasi Digital Aparatur Desa Langung dalam Menghadapi Hoaks di Media Sosial

Digital Literacy of Langung Village Apparatus in Addressing Social Media Hoaxes

Asmaul Husna

Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

Abstrak

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan penyebaran informasi palsu atau hoaks yang menuntut aparatur desa untuk memiliki literasi digital yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat literasi digital aparatur Gampong Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dalam menghadapi dan menangkal penyebaran hoaks. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling yang melibatkan delapan aparatur desa sebagai subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum literasi digital aparatur desa berada pada tingkat cukup baik, terutama pada aspek pemahaman dasar penggunaan media sosial dan upaya verifikasi informasi. Namun, kemampuan tersebut belum memenuhi kategori literasi digital kritis karena masih terdapat kelemahan dalam analisis mendalam terhadap sumber informasi dan mitigasi risiko digital. Kesimpulannya, meskipun aparatur desa telah mampu mengoperasikan perangkat digital untuk pelayanan publik, diperlukan peningkatan kapasitas yang lebih spesifik pada aspek analitis dan kritis guna menanggulangi penyebaran hoaks secara efektif di lingkungan pemerintahan desa.

Kata kunci: Literasi digital¹, aparatur desa², hoaks³, media sosial⁴, gampong langunge⁵

Abstract

A The advancement of digital technology presents the challenge of the dissemination of false information or hoaxes, demanding that village apparatus possess adequate digital literacy. This study aims to describe the digital literacy level of the apparatus of Gampong Langung, Meureubo District, West Aceh Regency, in facing and combating the spread of hoaxes. This research employs a descriptive qualitative method using a purposive sampling technique, involving eight village apparatus members as research subjects. Data were collected through observation and in-depth interviews, then analyzed using the Miles and Huberman model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that, in general, the digital literacy of the village apparatus is at a fairly good level, particularly in the aspects of basic understanding of social media usage and information verification efforts. However, these capabilities do not yet meet the category of critical digital literacy due to persisting weaknesses in the in-depth analysis of information sources and digital risk mitigation. In conclusion, although the village apparatus is capable of operating digital devices for public services, more specific capacity enhancement in

analytical and critical aspects is required to effectively tackle the spread of hoaxes within the village government environment.

Keywords: *Digital literacy¹, village apparatus², hoaxes³, social media⁴, Gampong Langunge⁵*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Era digital tidak hanya memengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga menuntut aparatur desa untuk mampu beradaptasi dengan berbagai media digital sebagai sarana komunikasi dan pelayanan publik. Literasi digital menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, khususnya aparatur desa yang berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat di tingkat gampong. Literasi digital mencakup keterampilan memperoleh, memahami, serta memanfaatkan informasi yang bersumber dari berbagai media digital (Novia Maulana & Setyaningrum, 2024). Dengan literasi digital yang baik, aparatur desa diharapkan mampu menemukan, menggunakan, dan menyampaikan informasi secara etis, kritis, dan bertanggung jawab.

Dalam perkembangannya, literasi digital tidak hanya sekadar kemampuan menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup delapan aspek penting, yaitu: pemahaman konteks dunia digital, kemampuan menilai konten secara kritis, sikap konstruktif, pemahaman jejaring dan komunikasi, rasa percaya diri yang bertanggung jawab, kreativitas dalam menghasilkan konten yang benar, kemampuan berpikir kritis terhadap isi media, serta tanggung jawab sosial dalam bermedia (Ahmad, 2022). Kedelapan aspek ini membentuk dasar kemampuan digital masyarakat modern, termasuk bagi aparatur desa yang kini semakin bergantung pada platform digital dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Namun, kemajuan teknologi digital juga menghadirkan tantangan serius, terutama dalam bentuk penyebaran informasi palsu atau hoaks. Hoaks adalah berita bohong yang disebar dengan tujuan menipu atau menyesatkan publik, dan sering kali menimbulkan keresahan, kebencian, bahkan perpecahan di tengah masyarakat (Fatmawati et al., 2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023), hoaks merupakan kabar atau informasi bohong yang sumbernya tidak jelas dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik. Di era media sosial, hoaks dapat menyebar sangat cepat melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, dan X (Twitter), terutama di wilayah yang tingkat literasi digitalnya masih rendah.

Penelitian yang dilakukan (Biby & Ali, 2023) di Gampong Murong, Aceh Utara menunjukkan bahwa sosialisasi literasi digital berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hoaks. Namun,

penelitian mereka juga menegaskan perlunya pelatihan lanjutan yang berfokus pada aparatur desa sebagai agen perubahan yang aktif dalam memberantas hoaks dan membangun lingkungan informasi yang sehat di desa. Dalam konteks ini, aparatur desa memiliki tugas strategis sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan masyarakat desa dan berperan sebagai teladan dalam bermedia digital.

Observasi di Gampong Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yang dilakukan pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 2025 mengungkapkan bahwa aparatur desa sudah memiliki pemahaman dasar mengenai literasi digital namun belum sepenuhnya mampu menerapkannya secara maksimal dalam menghadapi hoaks. Keuchik desa, misalnya, menyampaikan pengalaman sering menerima telepon penipuan yang mengatasnamakan pemerintah pusat terkait dana desa. Meskipun mampu mengenali modus tersebut dari nomor yang tidak resmi dan gaya bicara yang mendesak, sebagian besar aparatur lain belum memiliki pengalaman atau pelatihan formal terkait literasi digital dan penanganan hoaks. Berdasarkan wawancara dengan delapan aparatur desa, belum pernah di adakan sosialisasi literasi digital di gampong Langung untuk aparatur desa maupun Masyarakat Gampong Langung.

Dalam praktik sehari-hari, aparatur desa juga menghadapi berbagai kasus hoaks dan isu yang berkembang di media sosial. Salah satu contoh adalah unggahan Facebook yang menuding keuchik tidak adil dalam pembagian bantuan sosial sehingga sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Keuchik memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah internal desa, tanpa memperpanjang perdebatan di ruang digital yang seringkali memperburuk situasi. Sikap ini menunjukkan kedewasaan sosial, namun juga menandakan bahwa mekanisme formal untuk menangani hoaks di tingkat desa belum terbentuk secara sistematis.

Pentingnya literasi digital semakin menonjol ketika media sosial menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat desa. Berdasarkan temuan (Monggilo, 2020) rendahnya budaya membaca dan kurangnya kemampuan berpikir kritis menyebabkan masyarakat mudah mempercayai informasi tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan literasi digital dan sosialisasi yang menasar aparatur desa sebagai ujung tombak komunikasi pemerintahan desa. (Kurniawan et al., 2021) menekankan bahwa literasi digital aparatur desa tidak cukup hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga harus mengedepankan aspek etika digital dan tanggung jawab sosial agar penyebaran informasi palsu dapat diminimalisir.

Selain itu, data observasi menunjukkan Gampong Langung masih belum memiliki akun media sosial resmi yang digunakan sebagai kanal informasi publik. Akibatnya, komunikasi dan penyebaran informasi sering kali terjadi melalui grup WhatsApp pribadi yang tidak terkontrol, sehingga risiko tersebarnya hoaks semakin besar. Contoh nyata ditemukan pada sebuah unggahan TikTok yang menggunakan foto Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dengan narasi keliru bahwa beliau mematikan listrik di wilayah Aceh. Postingan ini pernah dianggap fakta oleh salah satu apatur desa, padahal setelah ditelusuri postingan itu merupakan hoaks. Fakta ini menjadi pembelajaran bahwa aparatur desa perlu meningkatkan kemampuan literasi digital untuk melakukan verifikasi informasi secara efektif sebelum mempercayai atau menyebarkannya.



Gambar 1. Contoh hoaks yang ditemukan aparatur (foto Bobby Nasution dengan narasi salah)

Tantangan lainnya berasal dari rendahnya tingkat literasi digital masyarakat desa. Banyak warga desa hanya membaca informasi dari judul tanpa memahami isi secara menyeluruh, sehingga mudah terjebak dalam misinformasi (Sujarwo et al., 2022). Minimnya pengalaman menggunakan teknologi digital semakin memperburuk situasi, yang berdampak pada kesalahpahaman terhadap manfaat digitalisasi yang semestinya dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. (Yuni Antika et al., 2025) Oleh karena itu, kolaborasi multipihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah literasi digital ini.

Pemerintah desa mulai mengalokasikan anggaran untuk pengembangan teknologi digital sebagai bagian dari upaya "membangun Indonesia dari desa". Keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis digital sangat bergantung pada peran aktif pemerintah desa dalam memperkuat infrastruktur, menyelenggarakan edukasi, dan mendukung inovasi. Pendekatan partisipatif yang dijalankan oleh menjadi solusi yang efektif, karena melibatkan masyarakat

secara langsung dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi desa agar sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya lokal.

Secara umum, tiga tantangan utama yang dihadapi dalam penguatan literasi digital aparatur desa di Aceh adalah: pertama, keterbatasan akses dan fasilitas teknologi; kedua, rendahnya kapasitas aparatur dalam menilai validitas informasi digital; dan ketiga, belum adanya kebijakan internal yang mendukung pendidikan literasi digital secara formal dan berkelanjutan di tingkat gampong. Namun, peluang penguatan literasi digital sangat besar jika ada sinergi dukungan dari lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Aparatur desa yang melek digital diprediksi lebih siap menghadapi tantangan penyebaran hoaks serta mampu menjadi fasilitator pengetahuan bagi masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat (Mesty Wibowo et al., 2025).

Fenomena hoaks di Aceh Barat sendiri semakin memperlihatkan pentingnya literasi digital yang baik di kalangan aparatur pemerintahan. Contoh yang paling nyata adalah kasus penipuan menggunakan nomor telepon palsu 082177772610 yang mengaku sebagai Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM. Kasus ini bukan hanya soal penipuan finansial, tetapi juga mencerminkan lemahnya mekanisme verifikasi publik terhadap informasi digital. Banyak masyarakat yang sempat percaya dan bahkan hampir mengirimkan uang karena merasa ditelepon langsung oleh figur pemerintahan. Melalui pernyataan resmi, Bupati Tarmizi menegaskan bahwa hal tersebut adalah berita bohong (hoaks) dan menegur keras pelaku yang mencatut nama pejabat untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menjadi cerminan nyata bahwa perlu ada sistem deteksi dini dan edukasi digital di tingkat akar rumput, agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh pesan-pesan digital palsu.



Gambar 2. Contoh hoaks yang mengatasnamakan Bupati Aceh Barat (Sumber: acehbaratkab.go.id,2025).



Gambar 3. Contoh hoaks tentang Gubernur Aceh memutus hubungan dagang dengan Medan (Sumber: komdigi.go.id,2025).

Selain itu, muncul pula unggahan video di Facebook yang mengklaim Gubernur Aceh Muzakir Manaf memutus hubungan dagang dengan Kota Medan. Unggahan itu ternyata hasil manipulasi narasi dari tayangan Metro TV dan diklarifikasi langsung oleh turnbackhoax.id serta Kominfo sebagai hoaks. Kasus seperti ini sangat berisiko menimbulkan ketegangan antarwilayah, karena narasi palsu yang menyangkut pejabat publik dapat memicu perpecahan opini di masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya penting untuk warga biasa, tetapi juga krusial bagi aparat desa sebagai penjaga stabilitas sosial di tingkat lokal.

Dari hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa aparat Gampong Langung sebenarnya sudah memiliki kesadaran terhadap bahaya hoaks, namun masih terbatas pada pengalaman pribadi. Sebagian besar belum pernah mengikuti pelatihan literasi digital yang terstruktur, sehingga kemampuan analisis kritis terhadap konten digital masih rendah. Hal ini tampak dari cara mereka menilai kebenaran informasi hanya berdasarkan gaya bahasa atau sumber kiriman, bukan dengan menelusuri situs resmi seperti Kominfo, Turnbackhoax, atau media kredibel. Aparatur juga mengakui bahwa media sosial sering kali menjadi ruang yang sensitif, karena kesalahan kecil dalam berkomentar bisa menimbulkan salah paham antarwarga.

Ketiadaan akun resmi media sosial desa memperparah situasi ini. Karena tidak ada kanal komunikasi publik yang terpercaya, masyarakat sering kali lebih cepat mempercayai pesan di grup WhatsApp ketimbang klarifikasi dari aparat. Padahal, jika desa memiliki akun resmi yang aktif, setiap hoaks dapat segera ditangkal dengan informasi yang benar. Kondisi ini memperlihatkan perlunya pembangunan kapasitas literasi digital yang sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat sosialisasi sesaat. Literasi digital seharusnya

menjadi bagian dari kebijakan internal desa, misalnya melalui pelatihan rutin, pembentukan tim pengelola media digital desa, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Teuku Umar yang memiliki kapasitas akademik dalam bidang komunikasi publik.

Dampak dari hoaks tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan wawancara dalam hasil observasi, beberapa aparaturnya mengaku bahwa isu palsu tentang pembagian bantuan sosial sempat menimbulkan ketegangan kecil di masyarakat. Namun, keuchik memilih menyelesaikannya secara musyawarah tanpa memperpanjang masalah di media sosial. Sikap bijak ini patut diapresiasi, tetapi juga menjadi tanda bahwa belum ada sistem formal dalam penanganan isu digital di tingkat desa. Jika dibiarkan, hoaks serupa bisa terulang dengan dampak yang lebih luas.

Secara sosial, hoaks dapat merusak kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa aparat desa tidak transparan atau dianggap ikut menyebarkan informasi palsu, legitimasi kepemimpinan bisa menurun. Hal ini tentu berbahaya bagi keberlangsungan pembangunan berbasis partisipasi, yang menuntut adanya kepercayaan dan komunikasi dua arah antara warga dan aparaturnya.

Dari sisi kebijakan publik, penelitian ini menjadi sangat relevan karena mendukung upaya pemerintah menuju transformasi digital desa. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti program Aduan Konten dan Literasi Digital Nasional (Siberkreasi). Namun, efektivitas program ini di tingkat desa masih rendah karena kurangnya perantara lokal yang bisa menjelaskannya dan menerapkannya dalam konteks masyarakat pedesaan (Yuliantini & Suswanta, 2024). Aparatur Gampong Langung berpotensi menjadi perantara tersebut jika dibekali dengan pemahaman dan keterampilan digital yang memadai.

Dengan demikian, penelitian tentang “Literasi Digital Aparatur Desa Langung dalam Menghadapi Hoaks di Media Sosial” memiliki nilai strategis baik secara akademik maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat pemahaman, tantangan, serta strategi yang dilakukan aparaturnya desa dalam menghadapi arus informasi palsu. Hasilnya diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret untuk penguatan kapasitas literasi digital di tingkat pemerintahan desa, terutama di Aceh Barat yang masih menghadapi kendala infrastruktur dan akses informasi.

Pada akhirnya, aparaturnya yang memiliki literasi digital tinggi bukan hanya menjadi pelindung masyarakat dari hoaks, tetapi juga penggerak utama desa cerdas (smart village) yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan bertanggung jawab secara sosial. Desa yang melek digital akan lebih siap membangun sistem komunikasi publik yang sehat, partisipatif, dan transparan,

mendorong terciptanya masyarakat Aceh yang bijak bermedia dan kuat menghadapi tantangan disinformasi di era digital.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan secara rinci tingkat literasi digital di kalangan aparatur Gampong Langung dalam menghadapi dan menangkal penyebaran hoaks di media sosial. Pendekatan ini dipilih karena tepat untuk menggali dan memahami fenomena sosial yang kompleks, khususnya berkaitan dengan pemaknaan subjektif, pengalaman pribadi, serta sikap dan perilaku para subjek penelitian dalam konteks penggunaan media digital.

Subjek penelitian terdiri dari delapan aparatur desa yang berdomisili di Gampong Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Penentuan subjek dilakukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan informasi desa dan penggunaan media sosial dalam tugas pelayanan publik. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur dalam dua tahap utama. Tahap pertama dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 2025, melibatkan seluruh delapan aparatur desa sambil menyebarkan lembar observasi untuk mendokumentasikan aktivitas dan interaksi mereka terkait literasi digital serta kasus hoaks. Tahap kedua merupakan wawancara lanjutan pada 5 November 2025 yang difokuskan pada empat aparatur kunci, yaitu Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan), dan Keuchik, guna mendalami informasi hasil temuan awal. Pendekatan semi-terstruktur ini memberikan fleksibilitas bagi informan untuk mengemukakan perspektif dan pengalaman secara terbuka, didukung observasi langsung di lingkungan pemerintahan desa untuk pengamatan situasional dan kontekstual.

Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahap utama, yakni reduksi data untuk memfokuskan informasi penting, penyajian data secara sistematis agar memudahkan interpretasi, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan pola dan tema yang muncul dari data tersebut (Agama et al., 2022). Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai aparatur desa, wawancara bertahap, serta temuan observasi, sehingga konsistensi dan validitas temuan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi digital merupakan minat, sikap, serta kemampuan seseorang dalam memanfaatkan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Selain itu, literasi ini juga mencakup kemampuan membangun pengetahuan baru, membuat konten, dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat (Veronika et al., 2022). Upaya untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat tidak hanya sekadar memperkenalkan media digital, tetapi juga mengintegrasikan media tersebut dalam aktivitas keseharian yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas. Sedangkan menurut (Banyuwangi, 2022), literasi digital adalah proses menemukan, menggunakan, serta menyebarkan informasi secara tepat dan efisien.

Penelitian mengenai literasi digital aparatur Gampong Langung dalam menghadapi penyebaran hoaks menunjukkan beberapa temuan penting yang menggambarkan kondisi aktual kapasitas digital aparatur, respon terhadap hoaks, serta tantangan kelembagaan pemerintahan desa dalam era teknologi informasi. Analisis ini disusun berdasarkan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dibahas melalui perspektif teoritis literasi digital dan keamanan informasi.

Secara umum, literasi digital aparatur berada pada tingkat cukup baik dari aspek pemahaman dasar terhadap penggunaan media sosial dan upaya verifikasi informasi, namun belum memenuhi kategori literasi digital kritis yang mencakup analisis mendalam terhadap sumber informasi dan kemampuan mitigasi risiko digital. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, temuan penelitian dipaparkan melalui enam subbagian berikut.

1. Pengalaman Aparatur Menghadapi Hoaks dan Dampaknya terhadap Pemerintahan Desa

Pengalaman aparatur desa menghadapi hoaks sering kali menciptakan ancaman terhadap keamanan personal dan legitimasi pemerintahan lokal, sebagaimana ditemukan dalam studi pemberdayaan aparatur di Desa Pinang Lama di mana rendahnya literasi digital berdampak pada kualitas layanan publik dan risiko keamanan data. Hoaks yang memanfaatkan konteks lokal mempercepat penyebaran kesalahpahaman sosial, mirip dengan temuan bahwa aparatur desa rentan terhadap manipulasi informasi tanpa verifikasi yang memadai (Elizabeth Sulzby, 2024).

Aparatur Gampong Langung menunjukkan bahwa fenomena hoaks bukan sekadar isu abstrak, tetapi turut memengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Keuchik menuturkan bahwa ia pernah menjadi korban penipuan digital dengan modus pengakuan sebagai perwakilan pemerintah pusat yang meminta pengiriman uang. Lebih dari itu, ia juga pernah difitnah melalui unggahan Facebook terkait ketidakadilan pembagian bantuan sosial. Kasus ini menciptakan sentimen negatif di masyarakat sebelum akhirnya diredam melalui musyawarah internal antara aparatur dan warga.

Kasus tersebut memperlihatkan dua aspek penting hoaks yang merugikan:

- a) ancaman terhadap keamanan personal aparatur melalui manipulasi identitas digital, dan
- b) kerusakan reputasi yang berdampak pada legitimasi pemerintahan tingkat lokal.

2. Respons Aparatur terhadap Penyebaran Hoaks: Pendekatan Preventif dan Kultural

Kapasitas literasi digital aparatur lebih baik daripada masyarakat desa, tetapi belum menjadi kebiasaan kolektif, dengan masyarakat bergantung pada WhatsApp dan TikTok tanpa budaya verifikasi (Fitriansyah & Nuryakin, 2021).

Respons yang diberikan aparatur Gampong Langung bersifat reaktif dan informal. Keuchik mengingatkan aparatur setiap apel untuk melakukan verifikasi informasi dan mengabaikan pesan dari nomor tidak dikenal. Selain itu, ketika isu digital menyebar ke masyarakat, mekanisme penyelesaian melalui musyawarah langsung menjadi pendekatan utama.

Pendekatan ini menunjukkan adanya nilai sosial lokal yang kuat dalam penyelesaian konflik. Namun, dari perspektif literasi digital modern, strategi tersebut belum mampu mengimbangi kecepatan penyebaran hoaks di ruang online. Respons yang bersifat lisan dan tatap muka lebih menekankan pemulihan reputasi setelah hoaks menyebar, bukan pencegahan sejak dini.

Dalam teori literasi digital, respons aparatur masih berada pada tahap literasi fungsional, penggunaan media sosial secara dasar dan kehati-hatian individu belum mencapai literasi kritis yang mencakup:

- a) evaluasi kredibilitas sumber
- b) pelacakan data berbasis situs resmi
- c) penerapan SOP mitigasi hoaks
- d) klarifikasi cepat melalui kanal digital resmi

Dengan kata lain, kapasitas aparaturnya cukup untuk melindungi diri sendiri, namun belum memadai sebagai pelindung informasi publik (Syahfira et al., 2023)

3. Kapasitas Literasi Digital Aparatur dan Kerentanan Masyarakat Desa

Seluruh narasumber menyetujui bahwa kapasitas literasi digital aparaturnya lebih baik daripada masyarakat desa secara umum. Aparatur telah melakukan verifikasi silang informasi dengan sumber tertentu seperti media mainstream, tetapi langkah tersebut belum menjadi kebiasaan kolektif dalam pelayanan publik.

Sebaliknya, masyarakat Gampong Langung dinilai memiliki ketergantungan tinggi pada pesan berantai WhatsApp dan narasi visual dalam TikTok. Minimnya budaya membaca serta dominasi kepercayaan pada figur yang dianggap otoritatif merupakan faktor yang mempercepat penerimaan hoaks. Kondisi ini selaras dengan studi literasi digital nasional yang menyebutkan bahwa masyarakat desa membutuhkan pembelajaran literasi digital secara langsung, terstruktur, dan berkelanjutan.

Ketimpangan kapasitas literasi digital antara aparaturnya dan masyarakat menjadi tantangan signifikan dalam pengendalian hoaks di tingkat akar rumput. Aparatur dihadapkan pada ekspektasi sebagai penyaring informasi publik, tetapi belum mendapatkan penguatan kompetensi institusional.

4. Tantangan Teknologi AI terhadap Kemampuan Deteksi Informasi

Aparatur desa memiliki kekhawatiran yang kuat terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya deepfake dan voice cloning yang berpotensi memanipulasi identitas aparaturnya. Keuchik secara khusus cemas jika wajah dan suaranya suatu saat digunakan untuk penipuan digital yang menyanggah warga. Ini merupakan bukti bahwa:

- a) kesadaran terkait risiko digital sudah mulai terbentuk,
- b) namun, mekanisme deteksi dan pencegahan belum tersedia.

Dari sisi literasi digital, kemampuan aparaturnya masih tertinggal dibandingkan laju perkembangan teknologi manipulatif. Hal ini

mengimplikasikan kebutuhan mendesak akan pelatihan deteksi hoaks AI dan literasi keamanan siber (cyber security literacy) (Rahmawati & Suharto, 2024).

5. Ketiadaan Sistem Tata Kelola Informasi Desa

Temuan penting lainnya adalah belum adanya kanal informasi digital resmi desa yang aktif, dengan informasi publik lebih banyak beredar melalui grup WhatsApp pribadi yang tidak memiliki kontrol arus informasi maupun standar verifikasi, sebagaimana ditemukan dalam studi kesiapan aparatur desa di mana ketergantungan pada komunikasi informal menghambat implementasi digitalisasi pelayanan public (Rahmawati & Suharto, 2024).

Situasi ini menimbulkan tiga konsekuensi:

- a) kanal resmi klarifikasi tidak tersedia pada saat hoaks menyebar
- b) rumor lebih cepat divalidasi oleh opini masyarakat dibanding fakta
- c) akuntabilitas komunikasi publik menjadi sangat lemah

Padahal, dalam konteks e-government dan smart village, kanal digital resmi merupakan instrumen penting bagi pemerintahan yang transparan dan responsive (Fitriansyah & Nuryakin, 2021).

6. Upaya Awal Preventif dan Rekomendasi Internal Aparatur

Meskipun belum terstruktur, sejumlah langkah preventif telah dilakukan aparatur seperti imbauan literasi digital melalui apel dan grup WhatsApp, penyelesaian isu digital melalui musyawarah warga, pemeriksaan silang sumber media, serta rencana mengaktifkan akun publik desa, selaras dengan program pemberdayaan aparatur Desa Pinang Lama yang menerapkan pelatihan praktik literasi digital melalui sesi kelompok dan WhatsApp untuk meningkatkan kehati-hatian informasi. Aparatur secara konsisten merekomendasikan pelatihan literasi digital formal untuk aparatur dan masyarakat, pembentukan tim pengelola media digital pemerintahan desa, penyusunan SOP tabayyun dan verifikasi digital, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Teuku Umar, mirip dengan model pendidikan literasi digital masyarakat desa yang menekankan pelatihan terstruktur dan kolaborasi institusi untuk pengelolaan informasi.

Rekomendasi tersebut menandakan kesiapan aparatur untuk meningkatkan tata kelola informasi secara berkelanjutan, sebagaimana

ditemukan dalam studi kesiapan digitalisasi aparatur desa yang merekomendasikan pembentukan tim digital dan SOP untuk adaptasi TIK dalam pelayanan publik.

Sintesis Pembahasan Analisis menyimpulkan bahwa aparatur Gampong Langung memiliki kesadaran baik mengenai pentingnya literasi digital dalam mencegah hoaks, tetapi kapasitas digital masih mengandalkan pengalaman personal dan belum didukung sistem terintegrasi, dengan ketiadaan kanal komunikasi publik resmi memperbesar peluang hoaks, selaras dengan temuan literasi keuangan digital aparatur desa yang rendah akibat kurangnya infrastruktur dan pelatihan institusional.

Untuk meningkatkan ketahanan informasi publik, diperlukan institusionalisasi literasi digital melalui kebijakan dan SOP, peningkatan kapasitas analisis kritis serta keamanan digital aparatur, penguatan ekosistem informasi desa melalui kanal digital resmi, dan program pemberdayaan masyarakat berbasis literasi digital, seperti yang direkomendasikan dalam literasi digital untuk mencegah hoaks pada aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan platform resmi (Hanifah, 2024).

Apabila rekomendasi ini diwujudkan, aparatur dapat bertransformasi menjadi aktor penting dalam desa cerdas adaptif dan tahan disinformasi, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan produktivitas aparatur pasca-pelatihan literasi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji literasi digital aparatur Gampong Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dalam menghadapi hoaks di media sosial dan menemukan bahwa aparatur desa memiliki pemahaman dasar yang cukup baik dalam mengoperasikan media sosial dan melakukan verifikasi informasi secara sederhana. Namun, literasi digital mereka belum sampai pada tingkat kritis karena masih ada kelemahan dalam kemampuan analisis mendalam terhadap sumber informasi serta mitigasi risiko digital yang semakin kompleks, seperti ancaman hoaks berbasis teknologi kecerdasan buatan (deepfake dan voice cloning). Hal ini diperparah oleh tidak adanya kanal media sosial resmi desa sebagai saluran komunikasi publik yang terkelola secara sistematis, sehingga informasi sering beredar melalui grup WhatsApp pribadi yang rawan penyebaran hoaks. Aparatur desa cenderung memberikan respons yang bersifat reaktif dan informal dalam menghadapi hoaks, misalnya

penyelesaian melalui musyawarah internal, yang meskipun menunjukkan kedewasaan sosial, belum cukup untuk mengimbangi kecepatan dan skala penyebaran informasi palsu di dunia digital. Di sisi lain, masyarakat desa sendiri masih memiliki literasi digital yang rendah, tinggi ketergantungannya pada narasi di platform seperti TikTok dan WhatsApp, serta minim budaya verifikasi sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh hoaks. Penelitian ini menyoroti bahwa tantangan utama adalah ketimpangan kapasitas literasi digital antara aparatur dan masyarakat, serta ketiadaan kebijakan dan sistem tata kelola informasi digital di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas digital aparatur desa melalui pelatihan formal yang fokus pada kemampuan analisis kritis, keamanan siber, serta pengelolaan informasi digital secara profesional. Selain itu, pembentukan tim pengelola media digital desa dan penyusunan SOP tentang verifikasi dan penanganan hoaks sangat diperlukan untuk menciptakan mekanisme preventif yang efektif. Rekomendasi lainnya adalah kolaborasi antara desa dengan institusi pendidikan seperti Universitas Teuku Umar untuk mendukung pemberdayaan aparatur melalui program-program literasi digital yang terstruktur. Dengan demikian, aparatur desa tidak hanya bertindak sebagai pelindung masyarakat dari bahaya hoaks, tetapi juga dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan sistem komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, mendukung terciptanya desa cerdas (smart village) yang tangguh menghadapi disinformasi di era digital.

REFERENSI

- Agama, P., Di, I., & Medan, M. A. N. (2022). *Jurnal Penelitian , Pendidikan dan IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM*. 3(2), 147–153.
- Ahmad, I. F. (2022). Urgensi Literasi Digital di Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Sebuah Tinjauan Sistematis. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/njpi.2022.v2i1-1>
- Banyuwangi, K. (2022). *DIKLUS : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Digital Literacy : Empowering Women in the Dasa Wisma Group in Banyuwangi*. 2(September), 115–126.
- Biby, S., & Ali, M. (2023). Sosialisasi Literasi Digital pada Masyarakat Gampong Murong-Aceh Utara. *Jurnal Solusi Masyarakat*, 3(2), 90–94.
- Elizabeth Sulzby. (2024). Peran Literasi Digital. *Pengertian Literasi Digital*, 3(1), 5.
- Fatmawati, S., Salzabila, R., Rizkitama, G. A., & Nugroho, R. A. (2019). Analisis Berita Hoaks di Korpus Sosial Media Guna Mengembangkan Model

- “KAPAK HOAKS” (Kemandirian Pembaca Menganalisis Konten Hoaks) Studi Analisis Wacana Kritis. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 15(2), 113–135. <https://doi.org/10.33633/lite.v15i2.2525>
- Fitriansyah, F., & Nuryakin, C. (2021). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang* *Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang Digital Village and Financial Literacy of the Village Officials: Evidence from Aceh Tamiang Pendahuluan*. 21(2). <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.14>
- Hanifah, H. T. (2024). *Model Pendidikan Literasi Digital Pada Masyarakat Desa: Strategi Pengembangan Kemampuan Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup*. 2(3), 42–47.
- Kurniawan, A., Octa Indarso, A., Yoga Sembada, W., & Anwar, K. (2021). Pemberdayaan Literasi Digital di Desa Waringin Kurung, Cimanggu Pandeglang. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 2(2), 91–105. <https://doi.org/10.33753/ijse.v2i2.35>
- Mesty Wibowo, A. M., Nur, S. A., Ageng Puspitasari, S., Agustina, I. S., Maharani, C. E., & Purwanto, M. Z. (2025). Peningkatan Literasi Digital dan Digitalisasi Data Desa di Kabupaten Magelang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 4(2), 46–58. <https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v4i2.1733>
- Monggilo, Z. M. Z. (2020). Analisis Konten Kualitatif Hoaks Dan Literasi Digital Dalam @Komikfunday. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.1.1-18>
- Novia Maulana, A., & Setyaningrum, V. D. (2024). Literasi Digital Dalam Mencegah Penyebaran Konten Hoaks Pada Aparatur Pemerintah Desa. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 3(1), 88–98. <https://doi.org/10.32939/altifani.v3i1.1791>
- Rahmawati, A. D., & Suharto, D. G. (2024). *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Digitalisasi Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri*. 4, 73–89.
- Sujarwo, S., Education, F., & Yogyakarta, U. N. (2022). *World Journal on Educational Technology: Current Issues Digital literacy model to empower women using community-based education approach*. 14(1), 175–188.
- Syahfira, I., Siregar, Y. D., & Purwaningtyas, F. (2023). HUBUNGAN ANTARA LITERASI DIGITAL DENGAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM “ UISU ” PEMATANG SIANTAR. 15(1),

92–102.

Veronika, R., Ginting, B., Arindani, D., Mega, C., Lubis, W., & Shella, A. P. (2022). *LITERASI DIGITAL SEBAGAI WUJUD PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. 3(2), 118–122.

Yuliantini, L. S., & Suswanta, S. (2024). The Effectiveness Analysis of the National Digital Literacy Movement SiBerkreasi Program in Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 204, 03004. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202420403004>

Yuni Antika, Mutia Sabila, Desta Natalia, Devi Auliya Sari, & Ihwan Nuddin. (2025). Digitalisasi Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 358–369. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.337>